

Institusionalisasi pemikiran pendidikan Mohammad Natsir ke dalam lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Tejo Waskito

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung, Indonesia

* tejowaskito@stebilampung.ac.id

Abstract

This research aims to investigate the institutionalization process of Mohammad Natsir's educational thoughts in Islamic higher education institutions in Indonesia. Qualitative research method was used in this study with document analysis technique as the main data source. The data obtained were then analyzed using content analysis. The results of the study show that Mohammad Natsir's educational thoughts were institutionalized through various efforts, one of which was the establishment of the Islamic College as a higher education institution that adopted Mohammad Natsir's vision and ideas, especially in the development of curriculum and the provision of education that integrates Islamic and Western education models. This institutionalization was also carried out through the development of a curriculum that emphasizes the provision of academic education in a balanced practice. In conclusion, Mohammad Natsir's educational thoughts were successfully institutionalized through the establishment of the Islamic College which later evolved into the Indonesian Islamic University, and provided important contributions to the development of modern and quality Islamic education in Indonesia.

Keywords: Mohammad Natsir; Integral Education; Islamic Higher School.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi proses institusionalisasi pemikiran pendidikan Mohammad Natsir dalam lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis dokumen sebagai sumber data utama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Pendidikan Mohammad Natsir diinstitusionalisasikan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah dengan pendirian Sekolah Tinggi Islam sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengadopsi visi dan gagasan Mohammad Natsir, utamanya dalam pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan model pendidikan Islam dan Pendidikan Barat. Institusionalisasi tersebut juga dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang menekankan pada penyelenggaraan pendidikan akademik dalam praktik yang seimbang. Kesimpulannya, pemikiran pendidikan Mohammad Natsir berhasil diinstitusionalisasikan melalui pendirian Sekolah Tinggi Islam yang kemudian berevolusi menjadi Universitas Islam Indonesia, dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendidikan Islam modern dan berkualitas di Indonesia.

Kata kunci: Mohammad Natsir; Pendidikan Integral; Sekolah Tinggi Islam.

Diserahkan: 06-04-2023 **Disetujui:** 27-04-2023 **Dipublikasikan:** 28-06-2023

Kutipan: Waskito, T. (2023). Institusionalisasi pemikiran pendidikan Mohammad Natsir ke dalam lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 285–303. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.13829>

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan (Kersten, 2018). Salah satu tokoh yang turut berperan penting dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah Mohammad Natsir. Ia dikenal sebagai seorang cendekiawan Muslim, pemikir, politisi, dan tokoh pendidikan yang telah memberikan pijakan penting dalam pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia (Setyaningsih, 2016). Pemikiran Natsir yang inklusif, visioner, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Barat, telah memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia (Madirier, 2015).

Natsir memang telah berkontribusi besar dalam bidang pendidikan Islam, terutama di tingkat perguruan tinggi Islam. Mengenai kontribusinya dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia sangat penting dan layak diteliti lebih jauh. Salah satu lembaga yang berhasil diinstitutionalisasi oleh Natsir adalah Sekolah Tinggi Islam (STI), sebuah perguruan tinggi Islam yang kelak berevolusi menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) (Soetjipto & Sitompul, 1986). STI adalah lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di Indonesia yang mengadopsi visi dan konsep pemikiran Natsir dalam pengembangan program pendidikan, yaitu sistem pendidikan yang mengintegrasikan antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Barat. Melalui pendirian STI tersebut, Natsir telah memperlihatkan komitmen dan visinya dalam mengembangkan pendidikan Islam modern yang berkualitas dan mampu bersaing di tengah pusaran globalisasi (Jabali & Jamhari, 2002).

Namun demikian, meskipun Natsir telah berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, sejauh ini masih belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji proses institutionalisasi pemikiran pendidikan Natsir ke dalam lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia, terutama STI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dan membahas secara khusus proses institutionalisasi pemikiran pendidikan Natsir ke dalam lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia, meski secara parsial tetap memberikan uraian terkait konstruksi pemikiran Pendidikan Natsir.

Sejauh yang dapat dilacak, hasil pencarian penelitian terkait kontribusi Mohammad Natsir dalam pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam, terdapat beberapa studi yang menarik. Suwarno (2017) membahas konsep pemikiran pendidikan Natsir dan bagaimana ia memperoleh pengetahuannya, sementara Mustopa (Mustopa, 2005) menitik-beratkan pembahasannya pada kontribusi Natsir terhadap pendidikan berbasis tauhid. Penelitian Friani (2020) mengenai pemikiran pendidikan Islam Natsir secara umum juga menarik untuk dipertimbangkan. Sedangkan Ahmad dan Nufus (2018)

menambahkan dimensi politik dalam penelitian yang hampir senada dengan penelitian sebelumnya.

Sementara itu, terkait penelitian Natsir pada umumnya, Badri (2021) membahas pemikiran Natsir tentang agama dan negara, sedangkan Khusni Yati (2006) meneliti kontribusi Natsir dalam pengembangan Islam di Indonesia. Penelitian Tia Marsela (2018) tentang pendidikan integral Natsir dan implikasinya terhadap pengembangan kurikulum menarik karena menemukan bahwa kurikulum mesti disusun berasaskan tauhid, harmonis, dan universal. Acmad Gholib (2013) juga menarik untuk dipertimbangkan karena penelitiannya mengenai implementasi pendidikan integral Natsir di perguruan tinggi di Jakarta dan Bekasi.

Penelitian yang secara khusus menyinggung kontribusi Natsir dalam pendirian perguruan tinggi Islam di Indonesia adalah hasil kerja sama penelitian antara Canada-International Development Agencies (CIDA) dengan Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi. Meski penelitian ini tergolong usang, hasilnya masih relevan dengan tema penelitian penulis. Sayangnya, peran Natsir dalam penelitian ini tidak dibahas secara mendalam, meskipun para peneliti setuju bahwa peran Natsir sebagai konseptor harus dicatat (Jabali & Jamhari, 2002). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menginvestigasi proses institusionalisasi pemikiran Natsir dalam membidani kelahiran Pendidikan tinggi Islam, khususnya Sekolah Tinggi Islam.

Dengan mempertimbangkan pada hasil penelitian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena memperkaya literatur tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia dan memberikan kontribusi pada pengembangan konsep pendidikan Islam yang lebih baik dan berkualitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan visi dan konsep pemikiran Natsir, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai upaya-upaya institusionalisasi pemikiran pendidikan dalam konteks pendidikan Islam.

Di tengah suburnya referensi tetapi juga sekaligus tandus akan institusionalisasi di ranah institusi, penulis memfokuskan pada studi yang berbeda dengan penelitian pada umumnya. Secara mekanis, penelitian ini merupakan bentuk ekspansi, eksplanasi, serta interpretasi ulang terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen sebagai sumber data utama. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tentang pemikiran Natsir dan pendidikan Islam di Indonesia. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur yang ada dan membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai proses institusionalisasi pemikiran pendidikan Islam di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif digunakan sebagai metode penelitian dalam studi ini dengan sumber data utama berupa dokumen, termasuk tulisan-tulisan dan publikasi Natsir, serta literatur sekunder lain yang relevan (Bogdan, 2009). Sumber data ini memungkinkan penulis untuk mengonfirmasi kebenaran data, memperluas pemahaman mengenai pemikiran Natsir dan pengaruhnya pada pengembangan institusi pendidikan tinggi Islam. Analisis dokumen digunakan untuk mengungkap kontribusi Natsir dan pemikirannya dalam konteks institusionalisasi lembaga pendidikan tinggi Islam. Penggunaan teknik ini memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam mengenai gagasan besar dan pandangan Natsir tentang pendidikan Islam.

Penggunaan penelitian kualitatif dan teknik analisis dokumen ini memungkinkan penulis untuk memahami konteks historis dan sosial budaya yang melatarbelakangi pemikiran Natsir dan pendirian sebuah institusi pendidikan. Metode ini juga membantu penulis dalam mengidentifikasi tema dan peran Natsir dalam pendirian perguruan tinggi Islam di Indonesia, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi institusionalisasi pemikiran Natsir dalam pendidikan tinggi Islam, termasuk konteks sosial politik yang mengitarinya.

Sumber-sumber penelitian ini dikumpulkan melalui kerja bibliografis dan kerja lapangan. Penulis mempelajari buku-buku, artikel-artikel, tesis akademik, laporan penelitian dari lembaga-lembaga penelitian, dan meneliti dokumentasi dari media yang relevan, khususnya *website* yang dipublikasikan secara nasional. Secara khusus, penulis membagi sumber-sumber hasil penelusuran bibliografis menjadi sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Di antara sumber-sumber primer yang penulis gunakan adalah buku *babon* karangan M. Natsir berjudul "Capita Selecta". Buku ini dihimpun oleh D.P. Sati Alimin dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 oleh penerbit Bulan Bintang. Selain itu, penulis juga menggunakan rujukan buku Natsir yang lain seperti "Fiqhud Dakwah", "Percakapan Antara Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak", dan "Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah". Sementara sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku hasil penelitian yang berkaitan dengan kiprah Natsir dalam dunia pendidikan, termasuk pembahasan mengenai lembaga pendidikan tinggi Islam dalam lingkup lokal seperti sejarah IAIN di Indonesia dan sejarah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam lingkup global.

Buku-buku yang dimaksud adalah buku yang ditulis oleh Fuad Jabali dan Jamhari (2002) berjudul "IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia"; H.A. Soetjipto dan Agussalim Sitompul (1986) berjudul "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) al-Jami'ah"; Malik Fadjar (2006) berjudul "Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren". Charles Michael Stanton (1994) berjudul "Pendidikan Tinggi dalam Islam"; Ajib Rosidi (1990) berjudul "M. Natsir: Sebuah Biografi"; dan buku karangan Yusuf A. Puar (1978) berjudul "M. Natsir 70 tahun Kenangan Kehidupan

Perjuangan". Selain itu, penulis juga menggunakan rujukan artikel yang tersebar di jurnal ilmiah nasional dan hasil penelitian tugas akhir mahasiswa, sebagaimana telah penulis cantumkan dalam literatur penelitian yang relevan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui hasil kerja bibliografis dan dilengkapi dengan pijakan-pijakan teoretis, data yang diperoleh kemudian dianyam, dianalisis secara sirkular dan kemudian ditarik sintesis melalui langkah triangulasi (Moleong, 2011). Melalui pijakan-pijakan teoretis tersebut, kajian ini menawarkan analisis secara empiris tentang bagaimana pemikiran Natsir menjelma ke dalam lembaga Pendidikan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, penelitian ini hanya menggunakan metode analisis dokumen sebagai sumber data utama, sehingga tidak ada data primer yang dikumpulkan dari wawancara atau observasi langsung. *Kedua*, penelitian ini hanya memfokuskan pada pemikiran pendidikan Natsir dalam pendirian perguruan tinggi Islam, yaitu Sekolah Tinggi Islam, sehingga tidak mencakup pemikiran tentang topik lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan tinggi Islam. *Ketiga*, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini hanya membahas perkembangan pendidikan tinggi Islam pada masa awal kemerdekaan hingga sekitar tahun 1960-an, sehingga tidak mencakup perkembangan mutakhir.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini terutama terletak pada ketersediaan sumber data. Meskipun banyak literatur yang tersedia mengenai pemikiran Natsir, beberapa di antaranya mungkin sudah usang atau sulit ditemukan. Selain itu, karena keterbatasan waktu dan ruang lingkup penelitian, penulis tidak dapat mengeksplorasi secara mendalam tentang pemikiran Natsir yang mungkin tidak terdokumentasi dalam tulisan atau publikasi. Keterbatasan ini memungkinkan penulis hanya memfokuskan pada kontribusi Natsir yang terdokumentasi dan dapat diakses secara mudah.

Meski banyak keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tentang pemikiran Natsir dan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks institusionalisasi pemikiran pendidikan Islam. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, seperti perguruan tinggi, Kementerian Agama, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberi ruang bagi penelitian lebih lanjut mengenai peran Natsir dalam perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, baik dari segi historis maupun filosofis.

Dalam rangka memperluas wawasan dan pemahaman mengenai pemikiran Natsir dan pendidikan Islam di Indonesia, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan kajian investigasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Peneliti juga dapat memperluas jangkauan waktu dan konteks dalam pengkajian pemikiran Natsir dan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk mengkaji peran Natsir dalam pendidikan tinggi Islam pada masa kini dan masa depan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Intelektual

Mohammad Natsir adalah seorang tokoh intelektual, pejuang, ulama, dan negarawan Muslim, dan ahli *siasah* yang disegani. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 (Puar 1978). Ia lahir di Kampung Jam Batan, Alahan Panjang, Solok, Sumatra Barat pada tanggal 17 Juli 1908 dan wafat pada tanggal 06 Februari 1993 M, bertepatan dengan 14 Sya'ban 1413 H di RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia 85 tahun. Sejak muda, Natsir sudah terlibat dalam dunia pergerakan nasional dan aktif dalam berorganisasi, khususnya dalam bidang pendidikan, dakwah Islam, dan politik. Ia terkenal dengan pandangan bahwa Islam harus menjadi landasan atau ideologi negara, namun tetap menyatakan bahwa demokrasi sejalan dengan Islam serta menekankan persatuan agama dan negara dalam pemerintahan (Badri, 2021; Luth, 1999).

Pemikiran Natsir yang teguh terhadap politik Islam membuatnya sering masuk dan keluar dari penjara, baik pada masa Soekarno maupun Soeharto (Yusafrida, 2012). Selain itu, Natsir juga pernah memimpin Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dari tahun 1945 hingga 1960 dan menjadi Perdana Menteri Indonesia kelima pada tahun 1950 (Madirier, 2015). Selain aktif di dunia politik, Natsir juga dikenal sebagai seorang intelektual dan ulama yang produktif (Luth, 1999). Ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan artikel yang membahas pandangannya tentang Islam, termasuk karya-karya seperti "Capita Selecta", "Fiqh ud-Dawah", dan "Agama dan Negara dalam Perspektif Islam". Di kancah internasional, Natsir pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim Dunia dan ketua Dewan Masjid se-Dunia (Abidin, 2012). Pada masa Presiden B.J. Habibie, Natsir diberikan penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana (Soetjipto & Sitompul, 1986). Meskipun gelar pahlawan nasional Natsir baru diberikan 15 tahun setelah kepergiannya pada tanggal 10 November 2008, warisan dan pemikiran Natsir terus dikenang oleh masyarakat Indonesia (Rosidi, 1990).

Kota Bandung adalah tempat di mana Natsir mulai terlibat dalam sejarah panjang perjuangannya. Ia mendalami agama Islam dan aktif dalam gerakan politik, dakwah, serta pendidikan sembari belajar di AMS Afdelling A kota Bandung. Di sana, ia bertemu dengan Ahmad Hassan, pendiri Persis, yang kelak diakui begitu mempengaruhi pemikirannya. Setelah belajar di AMS Afdelling A Bandung, Natsir mulai tertarik pada pergerakan Islam dan politik melalui organisasi *Jong Islamieten Bond* (JIB) yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, sebuah perkumpulan pemuda Islam yang terdiri dari pelajar Bumi Putra yang bersekolah di sekolah Belanda. Pada masa itu, Natsir telah berteman dengan tokoh-tokoh nasional seperti Mohammad Hatta, Prawoto Mangkusasmito, Yusuf Wibisono, HOS Tjokroaminoto, dan Moh. Roem (Rosidi, 1990; Anwar, 1971).

Karena kecerdasannya yang menonjol kala itu, ia ditunjuk menjadi ketua JIB Bandung (1928-1932), yang kelak juga membuatnya memperoleh gelar *Meester in de Rechten* (MR) (Puar 1978). Akan tetapi, setelah lulus dari AMS, ia tidak melanjutkan studinya dan lebih

memilih mengajar di sekolah MULO Bandung. Keputusan tersebut adalah panggilan bagi dirinya untuk mengajar agama yang menurutnya kurang ditekankan dalam pendidikan saat itu. Sadar akan pentingnya pendidikan agama, ia mendirikan lembaga Pendidikan Islam (PENDIS), sebuah institusi pendidikan modern yang menggabungkan kurikulum umum dan pesantren. Selama sepuluh tahun Natsir menjabat sebagai direktur PENDIS (1932-1942), lembaga tersebut telah berkembang ke berbagai wilayah di Jawa Barat dan Jakarta (Noer, 1994). Selain itu, ia juga menjadi Kepala Biro Pendidikan Kodya Bandung dan Sekretaris Sekolah Tinggi Islam di Jakarta (Noer, 1994; Madirier, 2015).

Salah satu prestasi cemerlang Natsir dalam sejarah tercatat ketika Indonesia berada dalam status Negara Serikat (Republik Indonesia Serikat-RIS) hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1950. Pada sidang tersebut, Natsir memperkenalkan “Mosi Integral” yang kemudian membawa implikasi besar bagi Indonesia yang telah terpecah menjadi 17 negara bagian. Hal ini memungkinkan negara tersebut untuk kembali bersatu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Noer, 1994). Gagasan Mosi Integral inilah yang kelak selalu menjadi landasan filosofis dalam gerak langkah pemikirannya, termasuk dalam bidang pendidikan (Jabali & Jamhari, 2002).

B. Konstruksi Pemikiran Pendidikan

Konstruksi pemikiran pendidikan Mohammad Natsir setidaknya memuat konsep tujuan akhir yang ingin dicapai, penyusunan kurikulum yang padu, dan metode pendidikan yang harus ditempuh. Dari sisi tujuan pendidikan, Natsir memiliki konsepsi tujuan pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, maju, mandiri, dan memiliki ketahanan rohaniah yang kokoh. Tujuan ini sejalan dengan tujuan manusia diciptakan, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Gholib, 2013; Marsela, 2018). Pendidikan Islam menuntut manusia menghambakan dirinya sepenuhnya kepada Allah, mengarahkan segala usaha dan upaya kepada-Nya, dan mempertimbangkan manusia sebagai khalifah terbaik di muka bumi.

Menurut Natsir, ketika manusia telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, maka ia telah berada dalam dimensi kehidupan yang menyejahterakan di dunia dan membahagiakan di akhirat (Natsir, 1973). Tujuan pendidikan harus mempertimbangkan posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi dan memahami bahwa 'menyembah Aku' melengkapi semua ketaatan dan ketundukan kepada perintah Ilahi yang membawa kebesaran dunia, kemenangan di akhirat, serta menjauhkan diri dari larangan yang menghalangi kemenangan di dunia dan akhirat (Natsir, 1973). Firman Allah surah al-An'am (6) ayat 162 mencerminkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai menurut Natsir.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Adapun dalam penyusunan kurikulum pendidikan, sistem pendidikan integral menjadi paradigma dalam acuan pelaksanaan (Bastoni dkk., 2008). Dalam penyusunan kurikulum pendidikan yang integral, Natsir menekankan bahwa tauhid harus menjadi dasar yang fundamental. Hal ini karena tauhid memiliki keterkaitan yang kuat dengan moralitas yang luhur. Dengan memasukkan tauhid sebagai landasan pendidikan, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan karakter yang agung sesuai dengan tujuan pendidikan, yakni menjadi pribadi yang jujur, tegas, tangguh, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diyakininya benar (Natsir, 1973, 1988b, 1988a).

Konsep tauhid yang dimaksudkan dalam pendidikan ini adalah konsep tentang kesatuan dan keesaan Allah sebagai dasar dari segala sesuatu. Pendidikan yang berbasis tauhid harus mengajarkan peserta didik untuk selalu merenungkan kebesaran dan keagungan Sang Pencipta, serta menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup hanya bisa terwujud berkat kehendak-Nya (Nata, 2005). Pendidikan yang menginternalisasi nilai tauhid ini diharapkan dapat membentuk generasi yang berpikiran terbuka, namun tetap konsisten dan memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang dipegangnya (Natsir, 1973).

Dengan kekuatan tauhid sebagai dasar pendidikan, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan karakter yang mulia, yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Pendidikan yang berbasis tauhid mengajarkan peserta didik untuk selalu bertindak dengan keikhlasan dan memegang teguh prinsip kejujuran serta keberanian untuk melaksanakan tugas yang diyakini benar. Dengan demikian, mereka akan menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab, yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan optimisme dan keberanian yang selalu mengandalkan rahmat dan pertolongan Allah.

Menurut Natsir, tauhid memiliki dua manfaat penting dalam membentuk kepribadian peserta didik (Natsir, 1988b). *Pertama*, tauhid dapat memperkuat kesadaran batin manusia, memunculkan spiritualitas yang mendalam, dan menjadi landasan etika pribadi. *Kedua*, tauhid menekankan pada kesatuan universal umat manusia sebagai satu umat, didasarkan pada prinsip-prinsip egalitarian, keadilan, kasih sayang, toleransi, dan kesabaran. Oleh karena itu, dalam konteks kemanusiaan, tauhid menegaskan prinsip-prinsip humanisme universal yang tidak terbatas, yang bersumber atau merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw.

Melalui dasar tauhid tersebut, akan tercipta integrasi antara pengetahuan agama dan ilmu semesta. Keduanya memiliki keterpaduan dan keseimbangan. Natsir juga membagi keseimbangan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum menjadi tiga hal pokok, yaitu: keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi; keseimbangan antara jasmani dan rohani; dan keseimbangan antara individu dan masyarakat (Iskandar Z. dkk., 2004). Dengan keseimbangan yang tepat antar aspek ini, pendidikan dapat membentuk kepribadian seimbang dan terintegrasi secara holistik (Assegaf, 2011; Riyanto, 2013).

Mencermati pembagian Natsir di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dalam pendidikan idealnya selain penguatan dialektika horizontal juga melakukan penguatan pada dimensi ketundukan vertikal (Abdullah, 2010). Dengan demikian, pendidikan akan melahirkan keseimbangan baik sisi fisik maupun rohaniannya. Konsep pendidikan integral, harmonis, dan universal tersebut oleh Natsir dihubungkan dengan misi ajaran Islam sebagai agama yang bersifat universal. Lebih jauh, bagi Natsir Islam bukan sekedar agama dalam pengertian yang sempit yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, melainkan mengatur hubungan manusia dengan manusia (Natsir, 1973, 1988b). Pada akhirnya, akan terjadi titik temu antara manusia sebagai makhluk sosial yang bertanggung jawab antar sesama.

Dengan menggunakan kurikulum pendidikan integral, maka proses transformasi ilmu pada peserta didik dapat ditempuh melalui tiga tingkatan yaitu: metode *Hikmah*, *Mauidzah* dan *Mujadalah* (Natsir, 1988a). Ketiga metode tersebut bersifat normatif dan diterapkan dalam tataran praksis yang dapat dikembangkan dalam berbagai model sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi peserta didik.

Dalam pandangan Natsir, beberapa metode yang diungkapkan di atas, terlihat metode *Hikmah* lebih berorientasi pada kecerdasan dan keunggulan. Metode ini memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi kemampuan memilih saat yang tepat untuk melangkah, mencari kontak dalam alam pemikiran guna dijadikan titik bertolak, kemampuan memilih kata dan cara yang tepat, sesuai dengan pokok persoalan, sepadan dengan suasana serta keadaan orang yang dihadapi. Natsir menambahkan bahwa implikasi metode *Hikmah* ini akan menjelma dalam sikap dan tindakan.

Metode *Hikmah* terdiri dari beberapa kategori yang berkaitan dengan pengenalan terhadap golongan manusia. Artinya, seorang pendidik harus memahami corak atau jenis peserta didik yang akan ditemuinya. Masing-masing golongan manusia harus didekati dengan cara yang sepadan dengan tingkat kecerdasan, sepadan dengan alam pikiran, perasaan, dan karakteristik individu masing-masing (Nata, 2020).

Dalam pandangan Natsir, metode *Hikmah* dibagi menjadi tiga golongan manusia yang berbeda, sebagaimana ia menukil kompilasi Muhammad Abduh. Golongan pertama adalah cerdik cendekiawan yang dapat berpikir kritis dan cepat menangkap realitas persoalan. Golongan kedua adalah orang awam yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, mereka disebut *Mauidzah al-Hasanah*. Adapun cara dakwahnya melalui ajaran yang mudah dipahami. Golongan ketiga adalah yang berada di antara kedua golongan di atas, mereka disebut *Mujadalah bi al-Lati Hiya Ahsân* yang metode dakwahnya dapat disampaikan melalui bertukar pikiran secara dialogis.

C. Konsep Integrasi Ilmu sebagai Jembatan Modernisasi Pendidikan Islam

Mohammad Natsir adalah seorang intelektual dan politisi Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pembaruan pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Sunnah (Natsir,

1973). Ia mencetuskan pembaruan pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Sunnah agar bersifat integral, harmonis, dan universal. Menurutnya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur kebutuhan kehidupan domestik manusia. Integral berarti menggabungkan antara sains dan agama. Sains harus dipandang sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan memperkuat keyakinan agama, sehingga dapat menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks (Riyanto, 2013).

Natsir juga mengajarkan bahwa pendidikan integral harus bersifat harmonis. Artinya, pendidikan Islam harus dapat mengintegrasikan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya mengandalkan teori dan buku-buku, tetapi juga memperkuat praktik. Praktik inilah yang dapat membantu peserta didik dalam memperoleh pengalaman-pengalaman yang konkret, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, bersifat universal berarti pendidikan Islam harus dapat diaplikasikan oleh seluruh manusia, tanpa memandang agama, ras, dan budaya. Hal ini penting dilakukan, karena menurutnya, pendidikan harus membentuk manusia yang berkarakter universal, yang mampu beradaptasi dan menghargai keberagaman budaya, serta mampu bekerja sama dengan manusia dari berbagai latar belakang (Natsir, 1973).

Pendidikan integral yang dikembangkan oleh Natsir merupakan jawaban terhadap masalah yang ada pada sistem pendidikan pada masa itu (Nata, 2005). Pendidikan pada masa itu terdiri dari dua pola yang berbeda, yaitu pendidikan umum yang dipengaruhi oleh pendidikan Barat dan pendidikan agama yang dipengaruhi oleh pesantren. Pendidikan di pesantren lebih fokus pada pengajaran agama dan akhlak, sehingga kurang memperhatikan pengajaran ilmu-ilmu umum seperti sains dan ilmu sosial. Hal ini menyebabkan lulusan dari pendidikan pesantren tertinggal dalam kemajuan sains dan teknologi. Di sisi lain, pendidikan umum lebih fokus pada pengajaran ilmu-ilmu dunia tanpa memperhatikan pendidikan agama dan akhlak (Nashir, 1997). Akibatnya, lulusan dari sekolah yang bercorak pendidikan umum bersikap hedonis dan apatis terhadap agama (Abdullah, 2010). Konsep pendidikan integral menurut Natsir tidak mengenal dualisme sistem pendidikan, baik di level paradigmatis maupun di level praksis. Menurut Natsir, kedua sistem pendidikan tersebut saling terkait dan saling memengaruhi secara berkesinambungan (Nata, 2005). Natsir menempatkan pendidikan sebagai sebuah sistem universal yang terintegrasi dengan baik. Dalam hal ini, terdapat kesinambungan antara aspek intelektual dan spiritual, aspek jasmani dan rohani, serta pendidikan agama dan pendidikan umum. Natsir menekankan bahwa pendidikan harus memenuhi kebutuhan manusia secara holistik, melalui penguatan kualitas individu secara menyeluruh. Dalam konteks ini, Natsir menawarkan sebuah pendidikan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan merangkul semua disiplin ilmu pengetahuan.

Pada level praksisnya, konsep pendidikan integral Natsir merupakan jembatan ke arah modernisasi sistem pendidikan Islam di Indonesia, khususnya lembaga pendidikan pesantren yang kala itu gagap menghadapi gempita modernitas. Konsep pendidikan integral menekankan pentingnya pengembangan seluruh aspek kepribadian peserta didik, baik jasmani, rohani, maupun intelektual, serta nilai-nilai keagamaan. Hal ini sejalan dengan upaya modernisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan zaman yang terus berkembang (Nata, 2023).

Dalam konteks modernisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan integral adalah solusi mengatasi kesenjangan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang dianggap lebih modern dan relevan dengan zaman (Abdullah, 2010). Dengan menerapkan konsep pendidikan integral, lembaga pendidikan Islam dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan mereka. Secara keseluruhan, pendidikan integral dapat dijadikan sebagai jembatan modernisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan zaman yang terus berubah.

Konsep pendidikan integral ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pendidikan fisik dan spiritual, pendidikan agama dan umum, pendidikan intelektual dan moral, serta dunia dan akhirat, sehingga semua unsur tersebut terintegrasi menjadi satu kesatuan yang seimbang dan harmonis. Prinsip ini juga dinyatakan dalam firman Allah Swt. surah al-Baqarah (2) ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang seimbang, adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Konsep pendidikan integral menurut pandangan Natsir didasarkan pada konsep tauhid sebagai landasan pendidikan. Setiap Muslim harus mempunyai landasan tauhid dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus bercorak pada tauhid (Natsir, 1973). Menurut Natsir, nilai-nilai ketauhidan harus ditanamkan pada peserta didik sejak usia dini, karena fase awal kehidupan anak akan lebih mudah membentuknya sebelum terpengaruh oleh materi, ideologi, dan pemahaman lain. Hal ini bertujuan agar kelak peserta didik mempunyai pemahaman agama yang kokoh dalam menjalani kehidupan mereka.

Pelaksanaan pendidikan yang dimulai sejak fajar tersebut sejalan dengan anjuran dari hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa "setiap anak dilahirkan dalam keadaan murni, kemudian orang tuanya yang menjadikan anak itu beragama Yahudi,

Nasrani atau Majusi" (HR. Bukhari). Selanjutnya, Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim: 6).

Menurut Natsir, tujuan dari ayat tersebut adalah untuk mengajarkan pentingnya memberikan pendidikan kepada anak dan istri agar terhindar dari kesesatan dan memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Bagi Natsir, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 104 yang menunjukkan pentingnya masyarakat yang saling berkoordinasi dan saling mengingatkan untuk melakukan kebajikan dan mencegah keburukan.

Jika diperas dan diambil sari patinya, sebagaimana dirangkum Abuddin Nata, peran dan fungsi pendidikan menurut Natsir, yaitu memimpin dan membimbing pertumbuhan jasmani dan rohani, mencapai *akhlakul karimah*, membangun kejujuran, mengarahkan pada tujuan hidup sebagai hamba Allah Swt., menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan mendorong sifat kesempurnaan manusia (Nata, 2005). Lebih jauh, konsep pendidikan dalam kerangka pemikiran Natsir senantiasa menghendaki adanya sistem pendidikan yang menghadirkan nilai-nilai religius. Artinya, meski dalam lembaga pendidikan umum, namun wajib melakukan transformasi nilai keagamaan sebagai spirit pengajaran (Natsir, 1988a). Meninggalkan fondasi tauhid dalam mendidik anak adalah kelalaian yang fatal.

Walaupun sudah dicukupkan makan dan minumannya, pakaian dan perhiasannya, serta dilengkapi ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya, semua itu, menurut Natsir, tidak berarti apabila meninggalkan dasar ketuhanan (ketauhidan) dalam pendidikan mereka. Natsir mencontohkan misalnya terkait munculnya intelektual Muslim yang menentang Islam merupakan kausalitas atas penyelenggaraan sistem pendidikan yang berbasis pada nalar agama yang keliru (Natsir, 1973).

D. Kelahiran Sekolah Tinggi Islam (STI)

Sebelum Indonesia merdeka, Natsir telah menapaki jejak intelektualnya di bidang pendidikan. Saat Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942-1945, seluruh partai Islam dibubarkan kecuali empat organisasi Islam yang tergabung dalam MIAI, seperti NU, Muhammadiyah, PUI di Majalengka, dan PUII di Sukabumi. Setelah MIAI dibubarkan, empat organisasi tersebut bergabung dalam satu wadah bernama Masyumi (Jamil dkk., 2007). Pada tahun 1945, Masyumi mengadakan rapat dan memutuskan membentuk barisan *Mujahidin* dengan nama *Hizbullah* untuk melawan Sekutu dan mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI), Sebuah perguruan tinggi Islam yang kelak bermetamorfosis menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Tujuan berdirinya STI adalah

untuk memberikan pendidikan tingkat tinggi mengenai agama Islam yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di masa depan (Fadjar, 2006).

Sejarah mencatat bahwa masyarakat Islam Indonesia telah lama bercita-cita untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam di level tertinggi. Meskipun PTKIN baru didirikan belakangan, tonggak pengembangan pendidikan tinggi Islam telah dicanangkan sejak lama. Contohnya adalah Dr. Satiman Wirdjosandjojo yang mendirikan Yayasan Pesantren Luhur sebagai pusat pendidikan tinggi Islam di Jakarta, namun tidak berumur panjang karena campur tangan Belanda. Pada tahun 1940, beberapa guru Muslim di Sumatera Barat juga mendirikan Sekolah Islam Tinggi, tetapi hanya berumur dua tahun karena Jepang memasuki Indonesia sebagai protektorat baru. Beberapa tokoh nasional seperti Mohammad Natsir, Mohammad Hatta, KH. Wahid Hasyim, dan KH. Mas Mansyur juga melakukan upaya serupa dengan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta pada 8 Juli 1945 di bawah kepemimpinan Abdul Kahar Muzakkar (Jabali & Jamhari, 2002).

Ketika revolusi kemerdekaan Meletus, STI terpaksa ditutup dan dibuka kembali pada 6 April 1946. Berbeda nasib dengan lembaga-lembaga sebelumnya, pada tanggal 2 Maret 1948, STI bermetamorfosis dengan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). UII kemudian mengembangkan empat fakultas, yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pendidikan. Di antara tokoh-tokoh di atas, nama Natsir, Hatta, dan Satiman penting untuk dilihat. Gagasan pendirian STI oleh ketiganya diterapkan secara gradual (Soetjipto & Sitompul, 1986). Meski begitu, nama Natsir layak disebut sebagai lokomotif pembentukan STI. Ini terlihat jelas dari pandangannya. Natsir berpendapat, lembaga pendidikan *pesantren* dan *madrasah* memang dapat menghasilkan orang yang beriman dan berperilaku baik, tetapi acuh terhadap perkembangan dunia. Dalam sebuah artikel berjudul 'Sekolah Tinggi Islam' Natsir menulis akan pentingnya STI menghasilkan kelompok intelektual yang memiliki basis pengetahuan keislaman dan kebudayaan yang kuat sebagai pendidikan alternatif ala Barat (Natsir, 1973, 1988b).

Adalah benar jika Natsir adalah sosok yang menjadi penggerak awal untuk gagasan pembangunan Sekolah Tinggi Islam (STI). Gagasan pendidikan integral yang diusung oleh Natsir berkaitan erat dengan langkah politiknya saat mengajukan "Mosi Integral" yang berhasil menggugah semangat perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia. Kesuksesan "Mosi Integral" dalam langkah politik Natsir menjadi landasan filosofis implementasi pengembangan STI. Meski begitu, penting untuk dicatat bahwa fakta historis mengatakan gagasan Pendidikan Integral telah lahir terlebih dahulu sebelum lahirnya "Mosi Integral", sebagaimana tertuang dalam kumpulan karangan Natsir yang ditulis sejak 1938. Baru setelah Indonesia merdeka, gagasan tersebut kemudian terwujud dalam bentuk STI yang menjadi kebanggaan umat Islam Indonesia kala itu. Kehadiran STI dalam panggung sejarah Indonesia ini sangat penting karena sebelumnya belum ada lembaga pendidikan yang dapat menjadi simbol keilmuan Islam yang kuat dan berakar di Indonesia. Oleh

karena itu, kehadiran STI kala itu dapat dianggap sebagai awal dari transformasi kebangkitan Islam di Indonesia (Esha, 2009).

Dalam pengembangannya, gagasan pendirian STI dielaborasi lebih jauh oleh Satiman dan Hatta lewat artikel-artikelnya. Dalam artikelnya, Satiman menulis dasar epistemologi pendirian STI yang dilatarbelakangi oleh empat hal, yaitu: [1] adanya kesadaran bahwa masyarakat Islam tertinggal dalam pengembangan Pendidikan dibanding non-Muslim; [2] masyarakat non-Muslim maju karena mengadopsi cara Barat dalam sistem pendidikan mereka; [3] perlunya menghubungkan sistem pendidikan Islam dengan dunia internasional; dan [4] dalam pendidikan Islam unsur lokal penting diperhatikan (Jabali & Jamhari, 2002; Soetjipto & Sitompul, 1986).

Kesan pengakuan kekalahan atas sistem Pendidikan non-Muslim yang lebih unggul bukan berarti tanpa alasan. Satiman membandingkan sekolah-sekolah Belanda dan sekolah-sekolah lain yang dibangun atas pola Belanda dengan lembaga pendidikan pesantren. Pesantren dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Ia menulis:

waktu Indonesia masih tidur, *onderwijcs* agama di pesantren mencukupi keperluan umum, akan tetapi sesudahnya dibangun dan merasakan jumlahnya buah dari bermacam-macam sekolahan, dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi, masyarakat merasa tak puas lagi dengan buahnya pesantren... Masyarakat sekarang melihat kurangnya penuntun agama kita, yang tak bisa dibandingkan dengan penuntun Kristen yang kebanyakan dapat didikan di Sekolah Tinggi. Tidak mengherankan jika Islam pengaruhnya semakin lama semakin kecil dan jajahannya semakin sempit (Jabali & Jamhari, 2002).

Catatan historis di atas sejalan dengan ungkapan Azyumardi Azra saat memberi catatan pengantar penelitian Stanton (1994). Azra menyebut jika Pendidikan Islam kala itu masih didominasi oleh nalar fikih. Ini terlihat jelas dengan maksud awal didirikannya lembaga pendidikan tinggi Islam dengan nama *Al-Jami'ah* sebagai balai konservasi ilmu-ilmu syariah. Meski terdapat perdebatan mengenai lembaga pendidikan Islam apa yang pertama kali muncul, banyak peneliti seperti Stanton menganggap Madrasah Nizhamiyyah (1064 M) sebagai lembaga pendidikan Islam pertama yang didirikan sebagai bibit pendidikan tinggi Islam. Meski begitu, Azra menganggap pandangan Stanton keliru. Madrasah-madrasah yang didirikan waktu itu, baik Nizhamiyyah ataupun *Al-Jami'ah* yang memang dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, semua tidak difungsikan untuk mengembangkan tradisi penyelidikan bebas berdasarkan nalar, sebagaimana yang terjadi pada pendidikan tinggi Eropa modern.

Sepanjang sejarah Islam, baik madrasah maupun *Al-Jami'ah* diabdikan terutama sebagai pelayan ilmu-ilmu keislaman, dengan penekanan pada fikih, tafsir, dan hadis. Meski pada praktiknya pengembangan ilmu-ilmu ini memerlukan ijtihad, namun ia tidak digunakan untuk kebebasan imajiner, tetapi sekadar upaya pembacaan ulang atas

doktrin yang telah mapan. Oleh karena itu, posisi ilmu-ilmu eksakta sejak awal memang sudah dalam posisi marginal. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan ini terjadi, sebagaimana penilaian Azra (1994). *Pertama*, erat kaitannya dengan pandangan tentang ketinggian syariah dan ilmu-ilmu keislaman seperti dijelaskan sebelumnya. *Kedua*, secara institusional, Lembaga-lembaga Pendidikan Islam memang dikuasai oleh mereka yang ahli dalam bidang ilmu agama. Mereka bahkan berhasil membangun struktur akademik yang canggih dan *elaborate* seperti halnya *professorship* di bidang ilmu-ilmu agama. *Ketiga*, berkaitan dengan kekuatan finansial Lembaga Pendidikan Islam yang sepenuhnya didanai oleh dana wakaf, baik dari dermawan kaya maupun penguasa politik Muslim.

Supremasi ilmu-ilmu agama dalam lembaga pendidikan Islam berdampak secara substansial dalam pengembangan ilmu-ilmu di luar kerangka agama, lebih-lebih mengakar dalam perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan. Secara keilmuan, ini melahirkan pemisahan secara diametral dan *antagonisasi* antar cabang ilmu pengetahuan. Memang, banyak filosof, pemikir, dan ulama Muslim seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Ghazali, al-Thusi, sampai Mulla Sadra telah mengklasifikasi ilmu-ilmu lengkap dengan hierarkinya dengan tujuan mengintegrasikan kembali keilmuan yang telah bercerai—setidaknya dalam formulasi konseptual—tetapi dalam praksisnya tak jarang tetap terjadi disharmoni antar cabang ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh hampir sepenuhnya berdasarkan nalar. Inilah yang menjadi akar ketertinggalan dunia Islam.

Realitas di atas persis seperti ketidakmampuan lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia dalam memotret problem sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Para tokoh konseptor STI melihat ada lubang hitam yang menganga besar. Selain problem dikotomi keilmuan di lembaga pendidikan Islam, kesadaran akan pentingnya partisipasi rakyat kecil dalam perjuangan kemerdekaan menjadi alasan besar dalam upaya pendirian STI. Selama itu, mereka yang aktif dalam pergerakan nasional adalah orang-orang yang terdidik di sekolah berbasis Eropa. Sementara masyarakat pada umumnya tidak mendapatkan akses Pendidikan atau paling jauh mendapatkan pendidikan di pesantren (Jabali & Jamhari, 2002). Hadirnya STI dianggap sebagai solusi mengatasi persoalan besar bangsa Indonesia kala itu. Seperti halnya diungkap Rumadi (2008), kehadiran pendidikan tinggi Islam di Indonesia memperlebar jalan santri untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada kepekaan sosial dan urbanisasi intelektual yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Untuk memangkas jarak antara nalar tradisionalisme sebagai dunia di mana mereka berpijak (nasional) dan modernisme sebagai dunia global di luar cangkang (internasional) masyarakat Indonesia, STI menerapkan kurikulum yang mengadopsi kurikulum lokal dan global. Dalam kurikulum lokal, STI memasukkan agama Hindu—atas dasar pertimbangan konsep ‘igama’ yang jadi jasa kultur masyarakat Indonesia [Jawa]—

sebagai mata kuliah, di samping juga ilmu kebatinan Jawa dan kitab wali-wali nusantara. Sementara untuk membangun jembatan pengetahuan global, STI memasukkan Bahasa Inggris sebagai mata kuliah, selain juga filsafat, ilmu hukum, sejarah, dan sosiologi (Jabali & Jamhari, 2002).

Pada awal dibentuknya STI, posisi jabatan struktural Natsir memang tidak berada di pucuk pimpinan. Dewan Ketua Kurator STI dijabat oleh Mohammad Hatta dan Natsir sebagai sekretarisnya. Rektor Magnificus oleh KH. A. Kahar Muzakkir, Natsir pula sebagai sekretaris, dan Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Sekretaris. Di samping menjabat sebagai sekretaris STI, Natsir kala itu menjabat sebagai Kepala Biro Pendidikan Kodya Bandung. Pada tahun 1932-1942, ia memimpin Lembaga Pendidikan Islam (PENDIS) yang menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Islam Bandung (UNISBA) yang kini menjadi universitas terpendang di kota Bandung. Setelah matang membangun PENDIS, Natsir berusaha untuk membangun institusi pendidikan Islam yang seragam dan bercita-cita sama dengan cara mengkoordinasikan program pendidikan. Dia memimpin pembentukan Perikatan Perguruan-Perguruan Muslim (PERMUSI) dan Badan Kerja sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS PTIS) di Indonesia. Gagasan dan upayanya melahirkan universitas Islam terkenal seperti UII, UISU, UNISBA, UMI, UNISSULA, UIR, Universitas Al-Azhar Indonesia, dan LPDI Jakarta yang sekarang menjadi STID Mohammad Natsir (Soetjipto & Sitompul, 1986). Dalam konteks transformasi lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, STI juga menjadi benih transformasi berbagai Universitas Islam Negeri di Indonesia. Hal ini dapat dilihat seperti halnya dalam alur transformasi kelembagaan di bawah ini:



Gambar 1. Transformasi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Dengan demikian, secara keseluruhan pembentukan STI sebagai upaya institusionalisasi gagasan pendidikan integral Natsir dan para tokoh nasional lainnya telah menjadi fajar kebangkitan Islam di Indonesia. Melalui upaya mereka dalam membangun lembaga pendidikan Islam yang terintegrasi, para pemimpin dan ulama Islam di Indonesia berhasil memajukan pendidikan Islam dan menciptakan perguruan-perguruan Islam yang terkenal dan terkemuka hingga saat ini. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan peradaban Islam di seluruh dunia, dan hal ini tak lepas dari peran penting STI dan para tokoh yang terlibat dalam pembentukannya. Oleh karena itu, STI dapat dianggap sebagai fajar kebangkitan Islam di Indonesia dan merupakan bukti nyata bahwa pendidikan dapat menjadi sarana untuk mencapai kemajuan dan perubahan.

IV. Kesimpulan

Studi tentang institusionalisasi pemikiran pendidikan Mohammad Natsir dalam lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia menemukan beberapa kesimpulan. *Pertama*, Pemikiran Mohammad Natsir memainkan peran penting dalam pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI) yang kemudian menjelma menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). STI sebagai ibu kandung perguruan tinggi Islam telah melahirkan puluhan Pendidikan tinggi Islam baik negeri maupun swasta.

Kedua, Konstruksi pemikirannya mengenai pendidikan integral Natsir telah mempengaruhi Gerakan pendirian pendidikan Islam dan menjadi jembatan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan tersebut muncul atas kesadaran bahwa umat Islam Indonesia tertinggal dalam bidang pendidikan dibandingkan dengan masyarakat non-Muslim, baik lembaga Pendidikan lokal di Indonesia secara khusus maupun di Barat pada konteks luasnya. Natsir berpendapat bahwa pendidikan integral dapat memberikan akses pengetahuan keislaman dan kebudayaan sekaligus sebagai tandingan atas menjamurnya model pendidikan ala Barat.

Ketiga, pemikiran Natsir tentang pentingnya integrasi terkait erat dengan langkah politiknya dalam mengobarkan 'mosi integral', ini menggugah kembali semangat perjuangan dan persatuan dalam paham kebangsaan. Konsep integrasi ilmu sebagai langkah lain juga menjadi bagian penting dari pemikiran pendidikan Natsir. Ia menganggap pendidikan Islam harus mengadopsi unsur-unsur ilmu pengetahuan modern untuk mengembangkan diri dan mampu bersaing di dunia internasional. Namun, penting juga untuk mempertahankan unsur-unsur keislaman dan kebudayaan lokal dalam pendidikan. Hal ini tercermin dalam akar epistemologi yang melatarbelakangi pendirian STI seperti halnya diungkap Satiman, salah satu tokoh yang turut *urun* gagasan pembangunan STI.

Daftar Pustaka

- Abd. Rachman Assegaf. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Rajawali Press.
- Abuddin Nata. (2005). *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. (2020). Penguatan Materi dan Metodologi Pendidikan Agama Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 244–266.
- Abuddin Nata. (2023). Peran transformatif perguruan tinggi Islam bagi kemajuan ilmu, kebudayaan dan peradaban di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 84–104.
- Acmad Gholib. (2013). *Gagasan Pendidikan Integral M. Natsir dan Implementasinya di Sekolah Tinggi Ilmu Dawah (STID) Mohammad Natsir Kramat Jati Jakarta dan Tambun Bekasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ahmad & Hayati Nufus. (2018). Pendidikan dan Politikus: Analisis Pemikiran M. Natsir Tentang Pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 39–52. <https://doi.org/10.33477/alt.v3i1.416>
- Ainul Badri. (2021). Pemikiran Muhammad Natsir tentang Agama dan Negara. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 5(2), 191–200.
- Ajib Rosidi. (1990). *M. Natsir: Sebuah Biografi*. Pustaka Antara.
- Bastoni dkk., H. A. (2008). *Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah*. Mujtama Press.
- Bogdan, R. dkk. (2009). *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Usaha Nasional.
- Carool Kersten. (2018). *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Era Reformasi*. Mizan.
- Charles Michael Stanton. (1994). *Pendidikan Tinggi dalam Islam*. Logos Publishing House.
- Deliar Noer. (1994). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Pustaka LP3ES.
- Diyah Khusni Yati. (2006). *Kontribusi Mohammad Natsir dalam Pengembangan Islam di Indonesia (1960-1993 M) [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52664/1/01120634_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf
- Emi Setyaningsih. (2016). Perjuangan dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993). *Jurnal TAPIS*, 12(2), 73–94.
- Fuad Jabali & Jamhari. (2002). *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.
- H.A. Soetjipto & Agussalim Sitompul. (1986). *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) al-Jami'ah*. Lembaga Pengabdian pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga.
- Haedar Nashir. (1997). *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Pustaka Pelajar.
- Iskandar Z. & dkk. (2004). *Dinamika Ilmu*. STAIN Samarinda.
- Lexy J. Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- M. Amin Abdullah. (2010). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- M. Mukhsin Jamil dkk. (2007). *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
- M. Natsir. (1973). *Capita Selecta*. Bulan Bintang.

- M. Natsir. (1988a). *Fiqhud Da'wah*. Penerbit Media Dakwah.
- M. Natsir. (1988b). *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*. Girimukti Pustaka.
- M. Natsir. (1989). *Percakapan Antara Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*. Media Dakwah.
- M. Thohir Luth. (1999). *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Gema Insani Press.
- Malik Fadjar. (2006). Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren. In *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidika Islam, Sosial dan Keagamaan* (1st ed.). UIN Malang Press.
- Mas'oeed Abidin. (2012). *Gagasan dan Gerak Dakwah Natsir*. Gre Publishing.
- Muhammad In'am Esha. (2009). *Institusional Transformation: Reformasi dan Modernisasi Pendidikan Tinggi Islam*. UIN-Malang Press.
- Mustopa. (2005). *Kontribusi M. Natsir Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia: Pendidikan Berbasis Tauhid*. Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Remy Madirier. (2015). *Islam and Politics in Indonesia; The Masyumi Party Betwen Democracy and Integralism*. NUS Press.
- Rosihan Anwar. (1971). *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*. PT. Kartika Tama.
- Rumadi. (2008). *Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*. Fahmina Institut.
- Saskhia Rahma Mouli Friani. (2020). *Pemikiran Pendidikan Islam Mohammad natsir. Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 1–18.
- Suwarno. (2017). *Pemikiran M. Natsir dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. *Dar El-Ilmi*, 4(1), 90–105.
- Tia Marsela. (2018). *Konsep Pendidikan Integral Menurut Mohammad Natsir dan Relevansinya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. IAIN Ponorogo.
- Waryani Fajar Riyanto. (2013). *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan; Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...) Person, Knowledge and Institution*. Suka Press.
- Yusafriada. (2012). *Kiprah Politik Mohammad Natsir*. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(2), 57–83.
- Yusuf A. Puar. (1978). *M. Natsir 70 tahun Kenangan Kehidupan Perjuangan*. Pustaka Antara.